

Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.
Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.
Drs. Jaulim Sirait, M.Si.



PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA



Diterbitkan oleh :

AMaFRaD PRESS

Jl Medan Merdeka Timur No 16
Jakarta Pusat 10110
Telp (021) 3513300 Fax : (021) 3513287
Email : amafradpress@gmail.com
Nomor IKAPI: 501/DKI/2014

ISBN 978-623-6464-71-7 (PDF)



9 786236 464717

ISBN 978-623-6464-70-0



9 786236 464700

AMaFRaD PRESS

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

©Hak cipta dilindungi Undang-undang nomor 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Penulis:

Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.,
Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.,
Drs. Jaulim Sirait, M.Si.

AMaFRaD  PRESS

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Penulis :

Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi.,

Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.,

Drs. Jaulim Sirait, M.Si.

Editor : Hery Choerudin, S.St.Pi., M.Si.

Dr. Heri Triyono, A.Pi, M.Kom

Dr. Maharani Yulisti, S.Pi, M.Si

Desainer Sampul : Tomi Aris, S.Kel, M.Han

Halaman : vii+69 halaman

Edisi/Cetakan :

Cetakan Pertama, 2023

Diterbitkan oleh :

Amafrad Press

Gedung Mina Bahari III Lantai 6

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Email : amafradpress@gmail

Anggota IKAPI: 501/DKI/2015

p-ISBN : 978-623-6464-70-0

e-ISBN : 978-623-6464-71-7 (PDF)

Hak Penerbitan © AMAFRAD Press

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pendidikan Pancasila adalah jendela utama yang memungkinkan mahasiswa memahami landasan moral, etika, dan prinsip-prinsip yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara dan panduan moral kita, bukan sekadar mata pelajaran di bangku kuliah. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang relevan dalam setiap aspek kehidupan. Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Dengan memahami prinsip-prinsip Pancasila, mahasiswa akan menjadi individu yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Selamat membaca, dan semoga buku ini membuka mata Anda terhadap pentingnya Pendidikan Pancasila dalam membentuk masa depan Anda dan masa depan bangsa ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2023
Direktur Politeknik AUP



KATA PENGANTAR

Pancasila yang juga dikenal sebagai dasar negara, bukanlah sekedar seperangkat prinsip atau aturan, tetapi merupakan panduan yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila adalah salah satu elemen penting dalam mendidik generasi muda Indonesia. Buku ini hadir untuk membantu mahasiswa memahami aspek-aspek kunci dari Pancasila, serta bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk etika sosial, politik, dan kemanusiaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, mahasiswa akan diberdayakan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kami mengundang mahasiswa untuk memahami, meresapi, dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai ini, mahasiswa akan menjadi agen perubahan yang positif dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Selamat membaca, dan semoga buku ini menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan menjelajahi Pendidikan Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Heri Triyono, A.Pi, M.Kom, Dr. Maharini Yulisti, M.Si, Ir. Pujoyuwono Martosuyono, M.Si, Dr. Ir. Nyoman Suyasa, M.S., Dr. Joni D. Haryadi, M.Sc dan Nur Azmi Setyawidati, S.T., M.Sc., yang telah mengoreksi dan memberikan masukan kepada tim penulis agar buku ini menjadi lebih lengkap dan penyajian materinya lebih baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala BRSDMKP, Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc; Sekretaris BRSDMKP, Dr. Rudi Alek Wahyudi, S.Pi, M.Si; Kapusdik KP, Dr. Bambang Suprakto, A.Pi., M.T.; Direktur Politeknik AUP, Dra. Ani Leilani, M.Si.; dan tim editor BRSDM serta semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penerbitan buku dimaksud.

SINOPSIS

Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang memiliki lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sejak jaman sebelum Pancasila menjadi dasar negara, nilai-nilai ini telah terwujud dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia Indonesia yang profesional dan bermoral.

Dalam era globalisasi seperti sekarang, di mana arus informasi, budaya, dan ideologi dapat dengan mudah menyebar melalui media dan teknologi, penting untuk mempertahankan akar budaya dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa bisa lebih menghargai keragaman budaya dan pandangan dalam negeri, serta memahami pentingnya persatuan dan toleransi di tengah perbedaan.

Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan identitas nasional, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan mengenali akar budaya dan nilai-nilai yang melekat dalam Pancasila, mahasiswa dapat menjaga identitasnya dalam menghadapi arus globalisasi dan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter dan moral masyarakat Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDIDIKAN PANCASILA	1
1.1 Urgensi dan Konsep Pendidikan Pancasila	1
1.2 Pentingnya Pendidikan Pancasila.....	10
1.3 Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis dan Politik Pendidikan Pancasila.....	12
1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila	12
2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila.....	14
3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila.....	15
4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila	16
1.4. Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila	17
BAB II SEJARAH PANCASILA	19
A. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (29 April 1946)	19
B. Panitia Sembilan (22 Juni 1945).....	20
C. Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945).....	21
D. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (18 Agustus 1945) 21	
E. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968.....	22
BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA.....	23
BAB IV FILSAFAT PANCASILA	25
4.1 Latar Belakang	25
4.2 Pengertian Filsafat Pancasila	26
4.2.1 Karakteristik dan fungsi filsafat pancasila	26
4.2.2 Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila.....	27
4.3 Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa	28
BAB V PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.....	31
BAB VI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	33

6.1 Pengertian Pancasila dan Ideologi.....	33
6.2 Pengertian Pancasila sebagai Ideologi	33
6.3 Hubungan Pancasila sebagai Ideologi.....	34
6.4 Makna Pancasila sebagai Ideologi	35
6.5 Pandangan Para Ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai Ideologi	37
6.6 Fungsi Pancasila sebagai Ideologi.....	40
6.7 Nilai Pancasila sebagai Ideologi	41
6.8 Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain	42
6.8.1 Ideologi Komunisme	43
6.8.2 Ideologi Liberalisme	44
6.9 Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai Ideologi.....	45
BAB VII PANCASILA SEBAGAI ETIKA	47
7.1 Pancasila Sebagai Sistem Etika.....	47
7.2 Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan.....	47
7.3 Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan	48
7.4 Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan.....	50
7.5 Sumber Historis, Sosiologis dan Politis tentang Pancasila	51
7.6 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	52
7.6.1 Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika	52
7.6.2 Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika.....	53
BAB VIII PANCASILA SEBAGAI KETATANEGARAAN.....	57
8.1 Kedudukan Pancasila	57
8.2 Kedudukan UUD 1945.....	58
8.3 Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.....	58
BAB IX PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN,	61
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	61
9.1 Pancasila Paradigma Pembangunan	61
9.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK.....	62
9.3 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial- Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).....	63
9.3.1 Pengembangan Ideologi	63

9.3.2 Pengembangan Politik.....	63
9.3.3 Pengembangan Sosial-Budaya	64
9.3.4 Pengembangan Ekonomi.....	65
9.3.5 Pengembangan Hankam.....	65
BAB X KEBANGKITAN NASIONAL DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN.	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I PENDIDIKAN PANCASILA

1.1 Urgensi dan Konsep Pendidikan Pancasila

Konsep Pendidikan Pancasila merujuk pada upaya untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter cinta tanah air, kebersamaan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang memahami negara, menanamkan rasa cinta tanah air, dan bangga menjadi warga negara Indonesia pada generasi muda penerus bangsa, termasuk para mahasiswa didik (Nadifah Nur Fauziah & Anggraeni Dewi, 2021). Urgensi Pendidikan Pancasila sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila juga dapat membentuk warga negara yang taat hukum, menghargai hak asasi manusia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan lingkungan. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Munculnya permasalahan yang melanda Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tergerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian Shifana Savitri & Anggraeni Dewi (2021) menunjukkan bahwa di era globalisasi, sebagian besar masyarakat Indonesia belum menerapkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Beberapa permasalahan yang menandakan berkurangnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia, diantaranya:

1. Kesenjangan Sosial

Indonesia masih memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi, baik dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur. Pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter dan sikap sosial yang

menghargai keberagaman, membangun kerja sama dan kebersamaan, dan mengedepankan keadilan. Di Indonesia, terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan sebagian kecil populasi, sementara banyak orang masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Kemudian, kesulitan akses ke pendidikan berkualitas merupakan masalah serius di Indonesia. Banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan seperti anak-anak dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi. Selain itu akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi permasalahan. Di beberapa daerah, fasilitas kesehatan yang memadai masih sulit dijangkau, dan banyak masyarakat tidak mampu memperoleh perawatan kesehatan yang baik. Infrastruktur yang kurang berkembang di sebagian wilayah Indonesia juga menciptakan kesenjangan. Beberapa daerah masih memiliki akses terbatas terhadap jalan, air bersih, listrik, dan layanan dasar lainnya, sementara daerah lain telah lebih maju dalam hal ini.

2. Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dan intoleransi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat konflik agama dan etnis yang sering kali dipicu oleh pandangan intoleran dan radikalisme. Misalnya, konflik antara kelompok agama yang berbeda atau etnis yang berbeda yang dapat mengarah pada kekerasan dan ketegangan sosial. Pendidikan Pancasila dapat membentuk pemahaman dan sikap yang toleran terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya, serta mendorong dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat.

3. Korupsi

Korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia. Indonesia telah mengalami sejumlah skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah tingkat tinggi. Selain korupsi di tingkat nasional, masalah korupsi juga seringkali terjadi di tingkat daerah. Pemimpin daerah, seperti gubernur atau kepala

daerah, sering kali terlibat dalam skandal korupsi terkait dengan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. Pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter yang jujur, berintegritas, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan lingkungan.



Gambar 1. Anti Korupsi

(Sumber : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>)

4. Ketidakpedulian terhadap Lingkungan

Indonesia masih memiliki masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, dan polusi. Pendidikan Pancasila dapat membentuk sikap dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan, menghargai keanekaragaman hayati, dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Sampah yang menjadi masalah lingkungan

(Sumber : www.smkn1mas.sch.id)

5. Kesadaran Perpajakan

Banyak wajib pajak di Indonesia yang tidak memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Limbong et al., 2023; Yasin & Safitri, 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya perpajakan dan kurangnya edukasi mengenai peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Muliari & Setiawan, 2011). Tingkat ketidakpatuhan dalam melaporkan pajak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama pada sektor informal dan UMKM. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kurangnya keterbukaan informasi mengenai kebijakan perpajakan dan pengelolaan pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami kebijakan perpajakan dan proses pengelolaan pajak akan sulit untuk memahami kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpajakan sebagai sumber pendapatan negara dapat mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap pembangunan nasional. Masyarakat cenderung tidak memperhatikan pentingnya membayar pajak dan sumbangannya bagi pembangunan nasional. Praktik-praktik penghindaran pajak atau penggelapan pajak oleh beberapa pihak tertentu dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Praktik ini dapat menciptakan persepsi negatif tentang perpajakan dan mengurangi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.



Gambar 3. Manfaat pajak bagi pembangunan
(Sumber: <https://flazztax.com>)

6. Disintegrasi Bangsa

Masalah disintegrasi bangsa adalah sebuah fenomena di mana terjadi perpecahan dan ketidakharmonisan antara anggota masyarakat dalam satu negara yang memiliki perbedaan dalam segi agama, suku bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa di Indonesia, antara lain perbedaan agama dan kepercayaan. Disintegrasi adalah masalah yang kompleks dan solusi atau pemecahannya harus segera dicari dengan tepat (Pianto, 2018). Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat. Perbedaan suku bangsa, budaya, ketidakadilan sosial dan politik identitas dapat menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa di Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpahaman dan konflik antara kelompok masyarakat yang memiliki suku dan budaya yang berbeda. Ketidakadilan maupun politik identitas dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik dan ketidakharmonisan antara kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan sosial dan ekonomi maupun identitas.

Untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang adil dan merata untuk

seluruh kelompok masyarakat, serta meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya kebhinekaan dan kerukunan antar kelompok masyarakat. Masyarakat dan sektor swasta juga perlu mempraktikkan nilai-nilai kebhinekaan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong dialog dan toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda.

7. Narkoba

Narkoba adalah salah satu persoalan yang sangat serius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat seperti ketergantungan, gangguan kesehatan mental dan fisik, penyalahgunaan, kejahatan, dan kerusakan hubungan sosial. Menurut (Adhari et al., 2021; Saputra, 2016; Raja Gukguk, 2019; Suyatna, 2018; Zaidan & Yuli, 2015), kejahatan narkoba adalah kegiatan ilegal dan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir. Jika kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini tidak ditindak tegas, peredaran narkoba akan terus meningkat. Selain itu, penyalahgunaan narkoba berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, psikologis, kesehatan dan sosial. Upaya untuk mengatasi masalah narkoba dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- Pendidikan Pencegahan Narkoba

Pendidikan pencegahan narkoba dapat diberikan sejak usia dini, seperti melalui kampanye dan seminar di sekolah dan masyarakat yang dapat disampaikan melalui cara yang efektif dan menarik sehingga dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

- Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tegas terhadap produsen, pengedar, dan pengguna narkoba perlu dilakukan untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan tersebut. Pemerintah harus meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

- **Penyediaan Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi**

Pemerintah perlu menyediakan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba untuk membantu mereka keluar dari kecanduan. Layanan ini perlu disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- **Kolaborasi Antar Instansi dan Masyarakat**

Upaya untuk mengatasi masalah narkoba memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat berupa kegiatan sosialisasi, kampanye, penyediaan layanan, dan upaya pencegahan serta rehabilitasi.

Dalam mengatasi masalah narkoba, diperlukan kesadaran dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

8. Diskriminasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum, adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan kelemahan dalam sistem peradilan. Salah satu komponen terpenting dari negara hukum adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Reformasi penegakan hukum adalah jawabannya bagaimana hukum Indonesia disusun dalam rangka pembentukan negara hukum yang diinginkan. Kerjasama antara lembaga peradilan dan masyarakat serta penggunaan teknologi dan inovasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia; antara lain dapat dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kesadaran hukum sosial dan kesadaran hukum Pemerintah (Ansori, 2017.; Usman, 2014; Santoso et al., 2023). Upaya untuk mengatasi masalah penegakan hukum

yang berkeadilan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan bagi hakim, jaksa, dan pengacara. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan sistem peradilan dapat bekerja dengan lebih profesional dan adil.

- Menjamin Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hak asasi manusia perlu dijamin dan dilindungi oleh pemerintah, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.

- Memperkuat Sistem Peradilan

Penguatan sistem peradilan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

- Kolaborasi dengan Masyarakat

Upaya penegakan hukum yang berkeadilan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak berwenang dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dan mengajukan keluhan apabila terjadi pelanggaran.

Dalam mengatasi masalah penegakan hukum yang berkeadilan, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional dan adil, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan merata.

9. Terorisme

Pendidikan Pancasila sangat penting dalam upaya mencegah terorisme karena terorisme dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara serta merusak nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terorisme merupakan salah satu ancaman besar terhadap kedaulatan suatu negara karena telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan rakyat. Untuk mengatasinya diperlukan suatu konsepsi yang tepat. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghilangkan radikalisme dengan pendekatan yang tidak mengancam, tidak melakukan kekerasan dan bermuara pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (Anggraeni et al., 2022; Budijanto & Rahmanto, 2021; Siagian, 2020).

Oleh karena itu, konsep Pendidikan Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, baik formal maupun non-formal. Konsep Pendidikan Pancasila dalam konteks terorisme dapat diarahkan pada tiga hal, yaitu pembentukan karakter yang kokoh: Pendidikan Pancasila harus membentuk karakter yang kokoh pada setiap individu agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran radikal yang dapat memicu tindakan terorisme. Pembentukan karakter yang kokoh harus dimulai sejak dini dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kejujuran, dan toleransi.



Gambar 4. Stop terorisme

(Sumber: <https://deskwasbang.polkam.go.id>)

Pendidikan Pancasila juga harus membina kesadaran kebangsaan pada setiap individu sehingga mereka dapat memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya. Dalam konteks terorisme, kesadaran kebangsaan dapat membantu mencegah munculnya aksi terorisme yang dapat merugikan negara dan bangsa. Penguatan nilai-nilai toleransi: Pendidikan Pancasila harus memperkuat nilai-nilai toleransi pada setiap individu agar mereka dapat menerima perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks terorisme, penguatan nilai-nilai toleransi dapat membantu mencegah munculnya aksi terorisme yang dilandasi oleh kebencian dan diskriminasi. Dengan mengintegrasikan konsep Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki karakter yang kuat, kesadaran kebangsaan yang tinggi, serta mampu memperkuat nilai-nilai toleransi dan menghindari aksi terorisme.

1.2 Pentingnya Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, berjiwa nasionalisme, dan

mencintai kebhinekaan. Berikut beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila sangat penting:

- Menumbuhkan Kesadaran dan Identitas Nasional

Pendidikan Pancasila membantu dalam menumbuhkan kesadaran dan identitas nasional yang kuat. Melalui pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila, peserta didik akan memahami betapa pentingnya cinta tanah air dan kesatuan bangsa.

- Membentuk Karakter dan Kepribadian

Pendidikan Pancasila juga dapat membantu dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi, dapat menjadi pondasi dalam membentuk karakter yang baik dan menjunjung tinggi moralitas.

- Memperkuat Kebhinekaan dan Toleransi

Bangsa Indonesia memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Pendidikan Pancasila dapat membantu dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi, dengan mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai.

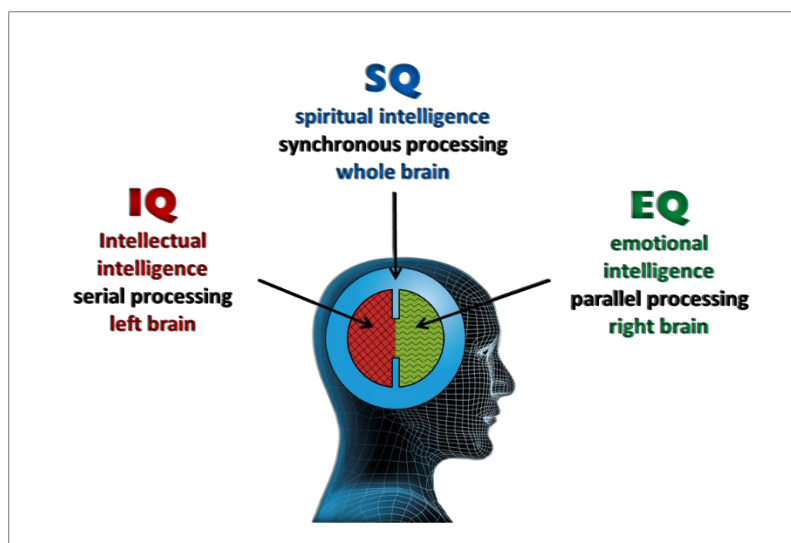
- Membangun Kesadaran Hukum

Pendidikan Pancasila juga dapat membantu dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui pembelajaran mengenai nilai-nilai keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan, peserta didik akan memahami pentingnya menghargai hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

- Menumbuhkan Kesadaran Berdemokrasi

Pendidikan Pancasila juga dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran berdemokrasi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi, peserta didik akan memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan

menghargai hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya pendidikan Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memperkuat karakter dan identitas nasional, serta membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu terus ditingkatkan dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia.



Gambar 5. *The Psychology of Spiritual Intelligence*

(Sumber: <https://sqi.co/the-psychology-of-spiritual-intelligence/>)

1.3 Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis dan Politik Pendidikan Pancasila

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Sumber historis Pendidikan Pancasila dapat ditemukan pada awal kemerdekaan Indonesia, ketika perumusan dasar negara sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Pada saat itu, tujuh tokoh yang tergabung dalam Panitia Sembilan menerbitkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi dasar pembentukan negara Indonesia.

Pada tahun 1945, M. Yamin, seorang anggota BPUPKI, mengajukan rumusan awal Pancasila yang kemudian diusulkan kembali oleh Soekarno pada 12 | Pengantar Pendidikan Pancasila

tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, pengesahan rumusan awal Pancasila tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila kemudian menjadi dasar falsafah negara dan dijadikan landasan konstitusional negara Indonesia. Setelah itu, Pendidikan Pancasila diresmikan dan diberlakukan di Indonesia pada tahun 1946, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1946 tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib bagi peserta didik sekolah di Indonesia, yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kecintaan terhadap negara, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar negara.



Gambar 6. Pidato Presiden Soekarno
(Sumber: <https://www.gurusiana.id/>)

Seiring perkembangan waktu, Pendidikan Pancasila terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari budaya dan identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, Pendidikan Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam penekanan dan tujuannya. Saat ini, Pendidikan Pancasila masih menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang

diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, dan menjadi pondasi dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia yang bermoral dan berkepribadian.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Beberapa sumber sosiologis Pendidikan Pancasila, antara lain:

- Konstitusi dan Undang-Undang: Konstitusi dan Undang-Undang merupakan sumber hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di Indonesia dan seluruh jenjang pendidikan harus mengajarkannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sistem Pendidikan Nasional: Sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila. Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Pancasila diajarkan sebagai mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
- Budaya dan Identitas Nasional: Pendidikan Pancasila juga didasarkan pada budaya dan identitas nasional bangsa Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diajarkan untuk menghargai keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, serta memperkuat rasa cinta terhadap tanah air.
- Fungsi Sosial: Pendidikan Pancasila memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk karakter dan kecintaan terhadap negara. Selain itu, Pendidikan Pancasila juga berfungsi untuk membentuk sikap toleransi, menghargai keberagaman, dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik.
- Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila. Melalui lingkungan sosial yang

kondusif, peserta didik dapat belajar dan mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memahami sumber-sumber sosiologis Pendidikan Pancasila, kita dapat memahami pentingnya pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, berbagai persoalan sosial di Indonesia dapat diselesaikan dengan Pendidikan Pancasila.

3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Sumber yuridis Pendidikan Pancasila dapat ditemukan melalui kajian mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa sumber yuridis Pendidikan Pancasila:

- Undang-Undang Dasar 1945: Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber utama dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib memiliki pendidikan dan pengajaran, dan Pendidikan Pancasila menjadi salah satu bagian dari pendidikan nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi sumber yuridis Pendidikan Pancasila di Indonesia. Di dalam undang-undang ini, Pendidikan Pancasila dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila: Keputusan ini menjadi sumber yuridis Pendidikan Pancasila di Indonesia. Melalui keputusan ini, Presiden dapat memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi sumber yuridis Pendidikan Pancasila di Indonesia. Peraturan ini membahas tentang rumusan sikap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Sumber politik Pendidikan Pancasila dapat ditemukan melalui kajian mengenai kebijakan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa sumber politik Pendidikan Pancasila:

- Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah menjadi sumber politik Pendidikan Pancasila di Indonesia. Pemerintah dapat memberikan arahan dan kebijakan mengenai pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi.
- Kebijakan Partai Politik: Kebijakan partai politik juga menjadi sumber politik Pendidikan Pancasila di Indonesia. Partai politik dapat memberikan pandangan dan arahan mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional di Indonesia.
- Gerakan Sosial dan Aktivistis: Gerakan sosial dan aktivis juga dapat menjadi sumber politik Pendidikan Pancasila di Indonesia. Gerakan sosial dan aktivis dapat memperjuangkan perlunya Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan moral bangsa.
- Media Massa: Media massa menjadi sumber politik Pendidikan Pancasila di Indonesia melalui publikasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila. Melalui media massa, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia.

Dengan memahami sumber-sumber politik Pendidikan Pancasila, kita dapat memahami pandangan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah, partai politik, gerakan sosial dan aktivis, serta media massa mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila. Hal ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran dan moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

1.4. Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila

Esensi Pendidikan Pancasila terletak pada tujuan utamanya, yaitu untuk membangun karakter bangsa yang memiliki semangat nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan budaya bangsa. Karakter generasi emas merupakan kekuatan utama untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, jaya dan bermartabat. Generasi emas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang memiliki kualitas dan potensi yang luar biasa, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa. Porsi nilai-nilai Pancasila dalam akumulasi materi PKN dalam pembentukan karakter bangsa sangat besar. Nilai-nilai pancasila terintegrasi satu sama lain (Andriani, 2016; Manullang, 2013). Pendidikan Pancasila juga memiliki urgensi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya, memerlukan Pendidikan Pancasila untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan membentuk identitas bangsa yang kuat. Selain itu, Pendidikan Pancasila juga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global dan lokal, seperti disintegrasi bangsa, dekadensi moral, dan masalah kejahatan.

Pendidikan Pancasila juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pendidikan Pancasila dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta dapat memahami nilai-nilai keadilan dan demokrasi

dalam sistem politik Indonesia. Urgensi Pendidikan Pancasila juga terlihat dari adanya perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan dan teknologi. Perubahan ini membuat kebutuhan akan pendidikan Pancasila semakin meningkat. Di era teknologi yang pesat, banyak aspek kehidupan terkait dengan penggunaan teknologi, seperti media sosial, keamanan siber, dan etika berinternet. Pendidikan Pancasila dapat membantu masyarakat dalam memahami nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang benar dalam penggunaan teknologi, serta menghindari penyebaran konten berbahaya atau tindakan yang tidak etis. Pendidikan Pancasila perlu disesuaikan dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan globalisasi agar tetap relevan dan dapat membangun karakter generasi muda yang kuat dan memiliki integritas.

Dalam upaya membangun esensi dan urgensi Pendidikan Pancasila, perlu adanya upaya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan dan mengembangkan kurikulum Pancasila yang responsif dan relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Pendidik perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam pengajaran Pancasila agar dapat memotivasi peserta didik dan membangun pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu turut mendukung upaya-upaya Pendidikan Pancasila dengan membentuk budaya yang mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran kebangsaan.

BAB II SEJARAH PANCASILA

A. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (29 April 1946)

Awal mula Pancasila bermula pada masa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia masih dalam keadaan perang dan sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kondisi yang sulit tersebut membuat para pemimpin bangsa harus segera menetapkan dasar negara dan ideologi yang akan menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia ke depan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), terdapat usulan dari Soekarno-Hatta untuk menetapkan dasar negara yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan tersebut kemudian disetujui dan dituangkan dalam sebuah dokumen bernama "Piagam Jakarta".

Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno, sebagai ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), juga telah mengemukakan sebuah konsep yang disebut "Pancasila" yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sama seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Konsep Pancasila kemudian diakui oleh BPUPKI dan dijadikan sebagai dasar negara dalam pembentukan UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dijadikan sebagai ideologi negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila kemudian menjadi landasan bagi pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia serta menjadi pijakan dalam pengembangan budaya, sosial, dan politik bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila dijadikan sebagai

mata pelajaran yang harus dipelajari oleh seluruh warga negara Indonesia dalam sistem pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang memiliki semangat nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial serta memperkuat ikatan kebangsaan dan membentuk identitas bangsa yang kuat.

B. Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

Panitia Sembilan adalah sebuah kelompok yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 oleh BPUPKI untuk membahas rancangan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang akan menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini terdiri dari sembilan anggota, yang dipimpin oleh Soekarno. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari para tokoh nasionalis dan intelektual Indonesia, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Soebardjo, Ki Hadjar Dewantara, Raden Mas Soedarsono, Abikusno Tjokrosoejoso, Chaerul Saleh, Wahid Hasyim, dan Sam Ratulangi. Kelompok ini bertugas untuk mengevaluasi dan merekomendasikan rancangan dasar negara dan konstitusi yang telah dibuat oleh BPUPKI.

Panitia Sembilan kemudian memutuskan untuk mengadopsi konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang telah diusulkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI sebelumnya. Konsep Pancasila yang diadopsi oleh Panitia Sembilan memiliki lima prinsip dasar, yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Panitia Sembilan untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan UUD 1945 dan menjadi ideologi negara Indonesia yang diwariskan hingga saat ini.

C. Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945)

Sidang BPUPKI II dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 di Gedung De Javasche Bank, Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh 62 anggota yang terdiri dari perwakilan dari berbagai daerah dan golongan masyarakat Indonesia. Sidang BPUPKI II ini diadakan untuk membahas rancangan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang telah disusun oleh Panitia Sembilan. Selama sidang, para peserta membahas dan meninjau kembali isi rancangan dasar negara dan konstitusi tersebut, serta menambahkan beberapa pasal baru. Salah satu hasil utama dari sidang BPUPKI II adalah terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Timur (BPUPKI Timur), yang dibentuk sebagai bagian dari usaha untuk menyatukan wilayah Indonesia. Selain itu, pada sidang BPUPKI II juga dihasilkan kesepakatan bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, yang diikrarkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang BPUPKI II merupakan tahapan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena di dalamnya diputuskan arah dasar negara dan konstitusi Indonesia yang menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka.

D. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (18 Agustus 1945)

Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Indonesia Raya, Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh 67 anggota yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sidang PPKI ini diadakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia secara resmi dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI. Dalam sidang ini, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi yang berisi deklarasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, sidang PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara Indonesia, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur tentang kedaulatan, susunan negara, hak asasi manusia, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sidang PPKI merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan

kemerdekaan Indonesia, karena di dalamnya Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Sidang ini juga menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara yang masih berlaku hingga saat ini. Menurut Sularto dan Yuniarti (2010), BPUPKI dan PPKI didirikan oleh Jepang masing-masing diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan 12 Agustus 1945.

E. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 April 1968. Instruksi Presiden ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memperkuat pengajaran Pancasila dan meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 berisi tentang beberapa hal, antara lain:

- Peningkatan pengajaran Pancasila di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal.
- Pemberian sanksi kepada lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan Pancasila secara benar dan menyeluruh.
- Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan yang berhasil meningkatkan kualitas pengajaran Pancasila.
- Penyebaran buku-buku dan materi pembelajaran tentang Pancasila kepada masyarakat luas.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pengajaran Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Instruksi Presiden ini juga menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang kuat.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang diakui dan dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan nilai-nilai keseimbangan hukum, nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan (Huda, 2018). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut:

- Sebagai landasan bagi seluruh kebijakan negara dan pembangunan nasional.
- Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk dalam menjalankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- Sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Sebagai pijakan dalam pengembangan kebudayaan dan identitas nasional Indonesia.
- Sebagai sarana dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang berjiwa Pancasila.

Dengan demikian, Pancasila memegang peran yang sangat penting sebagai dasar negara Indonesia. Karena itu, pengertian dan pemahaman yang benar tentang Pancasila serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta membangun Indonesia yang lebih baik dan maju. Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah salah satu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan pada 2003. Isi dari Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah tentang Pembukaan UUD 1945 dan Penetapan Empat Pilar Kebangsaan sebagai Dasar Negara. Empat pilar kewarganegaraan adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika

merupakan pilar yang bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia merasa nyaman, aman, damai dan sejahtera serta terhindar dari gangguan dan bencana (Jumansyah et al., 2022; Rajagukguk et al., 2022).

Dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, empat pilar kebangsaan tersebut ditetapkan sebagai dasar negara yang tak dapat diubah atau diganti oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keempat pilar kebangsaan tersebut bagi eksistensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dalam praktiknya, keempat pilar kebangsaan tersebut menjadi pijakan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari penyusunan kebijakan negara, pembangunan nasional, hingga pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai empat pilar kebangsaan tersebut menjadi sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama para pemimpin dan generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa.

BAB IV FILSAFAT PANCASILA

4.1 Latar Belakang

Latar belakang dari munculnya filsafat Pancasila berasal dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Selama masa kolonialisme, bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk penjajahan dan eksploitasi yang merugikan, sehingga menimbulkan semangat perjuangan untuk merdeka dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dalam perjuangan tersebut, bangsa Indonesia membutuhkan suatu pandangan atau filosofi yang dapat menjadi landasan bagi perjuangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh karena itu, Pancasila diangkat menjadi dasar negara Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sejarahnya, Pancasila tidak lahir begitu saja secara spontan, melainkan melalui perdebatan dan diskusi yang panjang antara para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini tercermin dalam sejarah lahirnya Pancasila, yang melalui beberapa tahapan, seperti sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan lain-lain.

Dalam proses perumusan Pancasila, banyak pandangan dan ideologi yang diperdebatkan dan diusulkan, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Pancasila bukanlah suatu pemikiran yang sederhana atau terbatas, melainkan terbentuk melalui berbagai pengaruh dan pengalaman yang kompleks. Latar belakang yang demikian kompleks dan beragam inilah yang menjadi landasan munculnya filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan yang mendalam dan holistik mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, filsafat Pancasila menjadi penting untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu bentuk pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

4.2 Pengertian Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila adalah sebuah pandangan atau pemahaman mengenai Pancasila sebagai suatu sistem pemikiran atau filosofi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila berusaha menjelaskan secara mendalam nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila serta memberikan interpretasi dan aplikasi dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila memandang bahwa Pancasila tidak hanya sekadar sebuah dokumen resmi atau simbol kebangsaan belaka, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu sebagai suatu sistem pemikiran yang sangat kompleks dan bermakna. Oleh karena itu, memahami Pancasila secara filosofis menjadi suatu hal yang sangat penting dalam memahami esensi dari keberadaan negara Indonesia.

Pendekatan filosofis dalam memahami Pancasila meliputi berbagai aspek, seperti ontologi (pemahaman mengenai hakikat keberadaan), epistemologi (pemahaman mengenai hakikat pengetahuan), dan aksiologi (pemahaman mengenai nilai atau moral). Dalam hal ini, Pancasila dipandang sebagai sebuah sistem yang mengandung nilai-nilai universal, seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Secara umum, filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, dan harmonis, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting bagi semua warga negara Indonesia sebagai bagian dari identitas dan karakter bangsa.

4.2.1 Karakteristik dan fungsi filsafat pancasila

Karakteristik dan fungsi filsafat Pancasila antara lain:

- Terbuka: Filsafat Pancasila bersifat terbuka, artinya dapat menerima dan memperhatikan berbagai pandangan dari berbagai sumber pemikiran.
- Universal: Filsafat Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal,

sehingga dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

- Dinamis: Filsafat Pancasila selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- Kritis: Filsafat Pancasila bersifat kritis, artinya mampu mengevaluasi dan memperbaiki diri dari kekurangan dan kelemahan yang ada.
- Realistis: Filsafat Pancasila berpijak pada realitas kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Fungsi filsafat Pancasila antara lain sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara, sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan budaya nasional, dan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam keragaman.

4.2.2 Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila

Prinsip-prinsip filsafat Pancasila terdiri dari lima aspek, yaitu:

- Ketuhanan Yang Maha Esa: prinsip ini mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sumber segala kehidupan dan kekuasaan.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab: prinsip ini menekankan pada pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.
- Persatuan Indonesia: prinsip ini menekankan pada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati perbedaan, dan memperkuat rasa persatuan dalam keragaman.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: prinsip ini menekankan pada pentingnya menjalankan pemerintahan yang demokratis, melalui proses

permusyawaratan/perwakilan, dengan mengedepankan kebijaksanaan.

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: prinsip ini menekankan pada pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip ini menjadi dasar dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia, baik dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

4.3 Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Filsafat Pancasila bukan hanya sekadar sebuah doktrin atau filsafat politik semata, namun ia memiliki peran penting sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Filsafat Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, Filsafat Pancasila memiliki karakteristik sebagai pandangan hidup bangsa karena:

- Bersifat holistik dan menyeluruh: Filsafat Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi sosial, budaya, politik, dan agama. Oleh karena itu, ia mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan.
- Berdasarkan pada nilai-nilai lokal: Filsafat Pancasila didasarkan pada nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Oleh karena itu, ia mampu menyeimbangkan antara nilai lokal dan universal dalam pandangannya.
- Dinamis: Filsafat Pancasila selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan situasi, sehingga ia terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Filsafat Pancasila memiliki fungsi penting, yaitu:

- Sebagai landasan etika: Filsafat Pancasila membentuk etika dan moral yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- Sebagai landasan politik: Filsafat Pancasila menjadi dasar bagi sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu negara kesatuan dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- Sebagai landasan kebudayaan: Filsafat Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan bagi pembentukan identitas budaya Indonesia, seperti keberagaman budaya dan toleransi antarumat beragama.

Dengan demikian, Filsafat Pancasila berperan penting sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang mampu membentuk etika dan moral, sistem politik, dan identitas budaya yang kuat dan berkelanjutan.

BAB V PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi yang mengatur dan mengarahkan seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah dan panduan negara Indonesia dalam menjalankan berbagai kebijakan dan keputusan politik, hukum, sosial, dan budaya. Dalam konteks politik, Pancasila menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut diwujudkan melalui pemilu atau pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia, serta melalui musyawarah mencapai mufakat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Demokrasi pancasila pada hakekatnya merupakan standar yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan dan kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dijadikan acuan dalam penyusunan semua peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu dan Pilkada sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Partisipasi masyarakat dalam politik memegang peranan penting sebagai wujud perwujudan nilai-nilai demokrasi, karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan sumber hukum yang dan sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan demokrasi Indonesia khususnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada nilai-nilai demokrasi Pancasila (Pulungan, 2015; Mulyono & Fatoni, 2019; Tedjo, 2019; Widodo, 2015; Yunus, 2016).

Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan bagi hakim dan lembaga hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan menjalankan keadilan di Indonesia. Dalam konteks sosial dan budaya, Pancasila jadi acuan bagi upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesiamemiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan politik, hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal dan selalu relevan, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

BAB VI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

6.1 Pengertian Pancasila dan Ideologi

Pancasila adalah sebuah konsep atau dasar filsafat negara yang terdiri dari lima prinsip dasar. Pancasila menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi, pada dasarnya, adalah seperangkat pandangan atau keyakinan yang membentuk suatu kerangka pemikiran untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi juga mencakup tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh suatu negara atau kelompok masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dianggap sebagai ideologi negara karena menjadi landasan filosofis yang mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia, seperti kebinekaan, persatuan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga menjadi ideologi yang memandu kebijakan politik, hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya bersifat sebagai konsep, tetapi juga memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara ringkas, Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai ideologi yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Indonesia. Ideologi, pada umumnya, merupakan kerangka pemikiran yang mencakup tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh suatu negara atau kelompok masyarakat.

6.2 Pengertian Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang juga dianggap sebagai ideologi yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mencakup pandangan dan keyakinan yang membentuk

kerangka pemikiran dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila sebagai ideologi mengandung lima prinsip dasar. Kelima prinsip ini menjadi landasan filosofis yang mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sebagai ideologi, Pancasila juga memandu kebijakan politik, hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Misalnya, dalam hal politik, ideologi Pancasila diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokratis, di mana pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, bebas, dan rahasia, serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal hukum, ideologi Pancasila diwujudkan melalui undang-undang dan kebijakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, serta dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga memandu upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memotivasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dianggap sangat penting karena menjadi acuan dan panduan dalam mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat. Ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal dan selalu relevan, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

6.3 Hubungan Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila sebagai ideologi yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai dasar filosofis, Pancasila menjabarkan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antara manusia dengan sesama, dan antara manusia dengan lingkungannya. Sementara itu, sebagai ideologi, Pancasila mengandung pandangan dan keyakinan yang membentuk kerangka pemikiran dan mengatur seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Pancasila ideologi memberikan orientasi dan arah bagi negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam praktiknya, Pancasila sebagai dasar filosofis dan Pancasila sebagai ideologi diwujudkan melalui berbagai kebijakan politik, hukum, sosial, dan budaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, dalam hal politik, ideologi Pancasila diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokratis, di mana pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, bebas, dan rahasia, serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal hukum, ideologi Pancasila diwujudkan melalui undang-undang dan kebijakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, serta dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi juga sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memotivasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi memiliki hubungan yang saling melengkapi dan saling memperkuat dimana Pancasila sebagai dasar filosofis memberikan pijakan teoritis, sementara Pancasila sebagai ideologi memberikan arah praktis dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia.

6.4 Makna Pancasila sebagai Ideologi

1. Sebagai cita-cita negara

Pancasila memiliki makna yang sangat penting sebagai ideologi dan cita-cita negara Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung keyakinan dan pandangan tentang tata kehidupan masyarakat yang ideal dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup yang menempatkan Tuhan sebagai sumber kehidupan, serta menghargai martabat dan kebebasan manusia, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mencapai

mufakat, dan keadilan. Melalui prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia mempunyai landasan yang kokoh dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan pemerintahan yang demokratis, serta mengatur kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Sebagai cita-cita negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal politik, cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam bidang ekonomi, cita-cita negara adalah mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam bidang sosial, cita-cita negara adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terampil, serta menjaga keberagaman dan kerukunan antarumat beragama, suku, dan budaya. Sedangkan dalam bidang budaya, cita-cita negara adalah mewujudkan bangsa yang mencintai kebudayaannya sendiri dan memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita negara memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pancasila harus dijadikan sebagai panduan utama dalam mengambil kebijakan dan tindakan pemerintah menjadi landasan moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berinteraksi dan berkehidupan bermasyarakat.

2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara

Selain sebagai cita-cita negara dan ideologi, Pancasila juga memiliki makna sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Artinya, Pancasila memiliki peran dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Melalui prinsip-prinsip Pancasila, seperti persatuan Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial, Pancasila menjadi nilai-nilai yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan moral yang dapat meminimalisir konflik dan memperkuat kesadaran bersama bahwa kita adalah satu bangsa yang harus saling menghormati,

menghargai, dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sebagai nilai integratif bangsa dan negara, Pancasila harus dipahami dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, sehingga Pancasila menjadi bagian dari kesadaran dan identitas bangsa. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai integratif bangsa dan negara, diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap solid dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, serta mampu membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

6.5 Pandangan Para Ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai Ideologi

Berikut adalah pandangan beberapa ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi:Indonesia

1. Soepomo

Soepomo merupakan salah satu tokoh pendiri negara Indonesia. Bersama dengan tokoh besar lainnya seperti Ir. Soekarno, M. Hatta, dan Muh. Yamin, mereka telah menggoreskan makna demokrasi yang ada di Indonesia. Soepomo terlibat dalam pembentukan dasar negara Indonesia, yang diwujudkan dalam ideologi Pancasila. Menurut Soepomo dan dikutip oleh Moh Yamin, gotong royong menjadi ciri khas dari manusia Indonesia dan lembaga sosial yang ada di Indonesia.



Gambar 7. Tokoh Pancasila : Soepomo

Sumber: wikipedia.com

2. Mohammad Natsir



Gambar 8. Tokoh Pancasila:Muhammad Natsir

Sumber: wikipedia.com

Mohammad Natsir, tokoh Islam Indonesia, menyatakan bahwa Pancasila adalah "agama nasional", yang memiliki sifat universal dan dapat dijadikan dasar bagi berbagai agama yang ada di Indonesia.

3. Mr. Raden Ali Sastroamidjojo



Gambar 9. Tokoh Pancasila: Mr. Raden Ali Sastromidjojo

Sumber: wikipedia.com

Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, salah satu tokoh pendiri negara Indonesia, menyatakan bahwa Pancasila adalah "jiwa bangsa", yang menjiwai seluruh kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

4. Mochtar Kusumaatmadja



Gambar 10. Tokoh Pancasila: Mochtar Kusumaatmadja

Sumber: wikipedia.com

Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, menyatakan bahwa Pancasila adalah "jiwa bangsa yang hidup", yang mampu

memperkuat identitas nasional dan menjadi dasar dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki makna yang sangat penting sebagai ideologi, yang mencakup keyakinan dan pandangan tentang tata kehidupan masyarakat yang ideal, serta memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga menjadi nilai integratif bangsa dan negara, yang memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, serta menjadi dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

6.6 Fungsi Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila memiliki beberapa fungsi sebagai ideologi, antara lain:

- Sebagai Pedoman Kebijakan Negara

Pancasila berperan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Sebagai Sumber Hukum

Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum bagi negara Indonesia. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga menjadi landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

- Sebagai Identitas Nasional

Pancasila menjadi identitas nasional Indonesia yang memperkuat keberagaman dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi simbol keberagaman dan harmoni antarumat beragama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia.

Sebagai Perekat Bangsa Melalui nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial, Pancasila menjadi perekat bangsa yang memperkuat kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa yang harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara.

- Sebagai Acuan Pendidikan

Pancasila juga berperan sebagai acuan dalam pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa pada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dengan fungsi tersebut, Pancasila menjadi ideologi yang sangat penting bagi negara Indonesia, yang dapat memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.7 Nilai Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi memiliki nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beberapa nilai Pancasila tersebut antara lain:

- Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memandang bahwa nilai-nilai agama menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai ini mengajarkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk selalu memperhatikan aspek keagamaan dan menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang utama, sehingga setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Nilai ini mengajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta menolak segala bentuk

diskriminasi dan penghinaan terhadap sesama manusia
Persatuan
Indonesia

Pancasila menegaskan bahwa keutuhan dan persatuan Indonesia merupakan nilai yang sangat penting. Nilai ini mengajarkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah adanya perpecahan dan konflik antar suku, agama, dan ras.

- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pancasila mengajarkan tentang pentingnya melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Nilai ini mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila menempatkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengajarkan untuk selalu memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial.

Nilai-nilai tersebut sangat penting dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

6.8 Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

Ideologi Pancasila adalah ideologi resmi negara Indonesia yang menjadi landasan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara dipilih sebagai dasar negara Indonesia karena dianggap mampu

menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dan universal yang berasal dari ajaran-agama, filsafat, dan budaya Indonesia.

Dalam praktiknya, ideologi Pancasila diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi Pancasila juga menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

6.8.1 Ideologi Komunisme

Ideologi Pancasila dan ideologi komunisme memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berikut adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme:

- Dasar filosofis

Pancasila memiliki dasar filosofis yang berasal dari ajaran-agama dan filsafat Indonesia. Sementara itu, ideologi komunisme didasarkan pada pemikiran Karl Marx yang mengutamakan materialisme dialektis dan menolak keberadaan Tuhan.

- Konsep kepemimpinan

Pancasila menekankan pada prinsip kepemimpinan yang demokratis, dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan adil. Sementara itu, ideologi komunisme menolak adanya kepemimpinan individual dan mengutamakan kepemimpinan kolektif oleh partai komunis.

- Sistem ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dengan prinsip berkeadilan secara sosial selalu diutamakan oleh sistem ekonomi yang dimiliki oleh Pancasila. Sementara itu, ideologi komunisme mengutamakan kepemilikan kolektif atas semua sumber daya ekonomi dan menolak kepemilikan individu.

- Konsep kebebasan

Pancasila menghargai kebebasan individu untuk memilih agama, kepercayaan, dan ideologi politik yang dianggapnya benar. Sementara itu, ideologi komunisme menekankan pada kebebasan kolektif dan menolak adanya kebebasan individual yang bersifat kapitalis.

- Konsep negara

Pancasila memiliki konsep negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, dengan mengutamakan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, ideologi komunisme mengutamakan kepentingan partai komunis dan menempatkan negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan politik partai.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila dan ideologi komunisme memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam banyak aspek. Ideologi Pancasila menekankan pada kebebasan individu, sistem demokrasi, dan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat, sementara ideologi komunisme menekankan pada kepemilikan kolektif, kepemimpinan partai komunis, dan penolakan terhadap kebebasan individual.

6.8.2 Ideologi Liberalisme

Perbandingan Ideologi Pancasila dan Liberalisme:

- Dasar filosofis

Pancasila memiliki dasar filosofis yang berasal dari ajaran-agama dan filsafat Indonesia. Sementara itu, liberalisme didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan kebebasan individu, hak-hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas.

- Konsep kepemimpinan

Pancasila menekankan pada prinsip kepemimpinan yang demokratis, dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara

bebas dan adil. Sementara itu, liberalisme menekankan pada pemilihan pemimpin melalui sistem demokrasi representatif.

- Sistem ekonomi

Pancasila memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial, dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha swasta. Sementara itu, liberalisme menekankan pada pasar bebas, kebebasan ekonomi, dan perlindungan hak milik pribadi.

- Konsep kebebasan

Pancasila menghargai kebebasan individu untuk memilih agama, kepercayaan, dan ideologi politik yang dianggapnya benar. Sementara itu, liberalisme mengutamakan kebebasan individual, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan bergerak.

- Konsep negara

Pancasila memiliki konsep negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, dengan mengutamakan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, liberalisme menempatkan negara sebagai pengatur yang terbatas dan menekankan pada kebebasan individu, pasar bebas, dan hak milik pribadi.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menekankan pada keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia sementara liberalisme menekankan pada kebebasan individu, pasar bebas, dan hak milik pribadi. Pancasila menempatkan negara sebagai wakil dari rakyat dalam mengatur kehidupan ekonomi dan politik, sementara liberalisme menempatkan negara sebagai pengatur yang terbatas. Namun, keduanya sama-sama menekankan pada pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi sebagai dasar negara.

6.9 Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai Ideologi

Pancasila dipilih sebagai ideologi negara Indonesia karena adanya

beberapa faktor yang mendasarinya, yaitu:

- Kebutuhan akan Ideologi yang Mampu Menyatukan Beragam Etnis dan Agama

Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis dan agama yang sangat kompleks. Dalam situasi ini, dibutuhkan sebuah ideologi yang mampu menyatukan semua elemen bangsa Indonesia. Pancasila dipilih karena mampu mewakili nilai-nilai kearifan lokal dan universal yang berasal dari ajaran-agama, filsafat, dan budaya Indonesia.

- Pengalaman Buruk dengan Ideologi Asing

Sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia telah merasakan pahitnya pengaruh ideologi asing seperti kolonialisme, kapitalisme, dan komunisme. Pengalaman ini membuat para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya memiliki ideologi berasal dari dalam negeri untuk menjaga kedaulatan dan kebebasan negara.

- Komitmen untuk Menciptakan Negara yang Berkeadilan

Pancasila dipilih karena mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia membutuhkan ideologi yang mampu menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

- Hasil dari Proses Perumusan yang Melibatkan Semua Pihak

Proses perumusan Pancasila sebagai ideologi negara melibatkan banyak pihak, seperti para tokoh nasional, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Hal ini membuat Pancasila menjadi ideologi yang disepakati bersama dan mampu mewakili kepentingan semua elemen bangsa Indonesia.

Dengan mendasarkan Pancasila pada faktor-faktor di atas, maka Pancasila menjadi sebuah ideologi yang kuat dan relevan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

BAB VII PANCASILA SEBAGAI ETIKA

7.1 Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika merujuk pada pandangan bahwa Pancasila adalah seperangkat prinsip etis yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sistem etika ini, Pancasila dianggap sebagai landasan moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap nilai dasar tersebut memuat ajaran moral dan spiritual yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap menghormati Tuhan Yang Maha Esa, menghormati hak asasi manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menerapkan demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia. Pancasila membantu membentuk sikap dan perilaku manusia yang positif, sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera, serta negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

7.2 Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan

Pancasila sebagai sistem etika memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Berikut adalah beberapa urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika:

- Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa

Pancasila sebagai sistem etika mendorong setiap warga negara Indonesia untuk menghormati perbedaan dan memelihara persatuan bangsa. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia.

- Menanamkan sikap toleransi dan menghargai keragaman

Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan pentingnya sikap toleransi

dan menghargai keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Sikap ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai.

- Meningkatkan moral dan integritas pribadi

Pancasila sebagai sistem etika mengandung nilai-nilai moral yang positif, seperti jujur, adil, berani, dan bijaksana. Sikap-sikap ini sangat penting untuk meningkatkan moral dan integritas pribadi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja.

- Mendorong partisipasi dalam pembangunan bangsa

Pancasila sebagai sistem etika mendorong partisipasi aktif dari setiap warga negara Indonesia dalam pembangunan bangsa. Hal ini meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

- Mewujudkan keadilan sosial

Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui Pancasila, setiap warga negara Indonesia diharapkan dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

7.3 Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan

Pancasila sebagai sistem etika memiliki konsep-konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan:

- Keadilan

Konsep keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam Pancasila

sebagai sistem etika. Keadilan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Keadilan juga berarti setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

- Kemanusiaan yang adil dan beradab

Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa setiap orang harus dihargai dan dihormati, tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menunjukkan bahwa setiap orang harus berperilaku sopan dan santun, serta menghindari tindakan yang merugikan orang lain.

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Konsep ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang bijaksana dan hasil musyawarah.

- Persatuan Indonesia

Konsep persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep ini menunjukkan bahwa keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia harus dihormati dan dipelihara, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai.

- Kemandirian

Konsep kemandirian menunjukkan pentingnya setiap orang untuk dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Hal ini meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial. Konsep ini juga menunjukkan pentingnya setiap orang untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk mencapai kemandirian tersebut.

Dengan demikian, konsep-konsep Pancasila sebagai sistem etika

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melalui konsep-konsep tersebut, diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat menjaga keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, persatuan Indonesia, dan kemandirian, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

7.4 Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan

Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengutamakan kepentingan bersama: Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan: Pancasila sebagai sistem etika menempatkan nilai kemanusiaan sebagai hal yang sangat penting dan harus dijaga. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan merata, tanpa diskriminasi dan kekerasan.
- Memelihara keberagaman: Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan pentingnya memelihara keberagaman dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan, agama, dan budayanya. Oleh karena itu, toleransi dan saling menghormati perbedaan menjadi sangat penting dalam menciptakan harmoni sosial.
- Memiliki sikap gotong royong: Pancasila sebagai sistem etika menekankan pentingnya memiliki sikap gotong royong dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang gotong royong, setiap individu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan

bersama.

- Mencintai tanah air: Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan pentingnya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Hal ini mencakup kecintaan terhadap budaya, bahasa, dan warisan leluhur yang menjadi identitas bangsa.

Secara keseluruhan, esensi Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi semua orang dalam masyarakat, serta mengembangkan karakter yang baik dan bermoral yang akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

7.5 Sumber Historis, Sosiologis dan Politis tentang Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sumber historis, sosiologis, dan politis yang penting untuk dipahami. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut:

- Sumber Historis

Sumber historis Pancasila dapat ditemukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Sejarah perjuangan tersebut meliputi berbagai gerakan nasionalis, termasuk gerakan-gerakan keagamaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Pancasila sendiri diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI sendiri diadakan pada masa pendudukan Jepang dan sebelum Indonesia merdeka secara de facto.

- Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila berkaitan dengan keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan ribuan suku, bahasa, dan agama memiliki tantangan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara hadir sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun kehidupan sosial yang harmonis dan adil

bagi semua orang.

- Sumber Politis

Sumber politis Pancasila terkait dengan tuntutan politik dalam membangun negara yang adil, makmur, dan merdeka. Pancasila sebagai dasar negara juga mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia untuk membangun negara yang berdaulat dan merdeka, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sangat penting untuk dipahami sebagai dasar negara Indonesia. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam membangun masyarakat dan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

7.6 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

7.6.1 Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Esensi Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika memuat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama, serta dalam membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa esensi Pancasila sebagai sistem etika:

- Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila sebagai sistem etika juga menempatkan nilai spiritual dan ketuhanan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia.

- Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pancasila sebagai sistem etika menempatkan manusia sebagai nilai yang

paling utama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dalam memperlakukan sesama manusia dengan hormat, merawat dan memuliakan sesama makhluk hidup, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Persatuan Indonesia

Pancasila sebagai sistem etika menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia dan pentingnya membangun kerjasama yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Pancasila sebagai sistem etika menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan negara dan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi dan partisipasi rakyat dianggap sebagai nilai penting dalam membangun masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera.

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai sistem etika menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini terkait dengan pengakuan bahwa semua orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Secara keseluruhan, esensi Pancasila sebagai sistem etika mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama, serta dalam membangun hubungan dengan lingkungan sekitar.

7.6.2 Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila memiliki urgensi sebagai sistem etika dalam kehidupan karena berperan dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral

yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa urgensi, antara lain:

- Membentuk karakter dan moral bangsa yang kuat: Pancasila sebagai sistem etika membantu membentuk karakter dan moral bangsa yang kuat dan berintegritas tinggi. Pengembangan perilaku dan sifat sesuai dengan moral tersebut dapat diinternalisasi dengan nilai-nilai moral Pancasila.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat: Dengan menginternalisasi nilai-nilai moral Pancasila, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Hal ini akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa: Pancasila sebagai sistem etika juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, Pancasila sebagai sistem etika menjadi landasan yang kuat untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan kepercayaan publik: Pancasila sebagai sistem etika dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika pemerintah dan institusi publik mengikuti prinsip-prinsip moral Pancasila, masyarakat akan lebih percaya dan memiliki kepercayaan yang lebih besar pada pemerintah dan institusi publik.

Dengan demikian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika membentuk karakter dan moral bangsa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, antara lain:

- Sebagai landasan moral bangsa: Pancasila sebagai sistem etika menjadi landasan moral bangsa Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila memberikan arahan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku sesuai dengan norma dan nilai moral yang baik.
- Sebagai sarana pembinaan karakter: Pancasila sebagai sistem etika juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi setiap individu. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, individu dapat membangun karakter yang baik dan memperkuat moralitas dalam kehidupannya.
- Sebagai sarana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa: Pancasila sebagai sistem etika membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan tentang keberagaman dan keragaman, serta mengajak masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
- Sebagai sarana mengatasi masalah-masalah moral: Pancasila sebagai sistem etika juga dapat menjadi sarana untuk mengatasi berbagai masalah moral yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, seperti korupsi, intoleransi, dan kekerasan. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, diharapkan masalah-masalah moral tersebut dapat dikurangi atau bahkan dieliminasi.
- Sebagai sarana menciptakan masyarakat yang beradab: Pancasila sebagai sistem etika juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang memiliki moralitas yang baik, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah untuk memberikan landasan moral bangsa, pembinaan karakter, menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa, mengatasi masalah-masalah moral, dan menciptakan masyarakat yang beradab.

BAB VIII PANCASILA SEBAGAI KETATANEGARAAN

8.1 Kedudukan Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara atau ideologi negara dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, harus berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum yang tertinggi di Indonesia, selain UUD 1945. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta didukung oleh suatu sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila".

Kedudukan Pancasila sebagai ketatanegaraan juga tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah harus berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi materi pendidikan wajib di sekolah-sekolah di Indonesia, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan harus menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar doktrin atau konsep, tetapi menjadi prinsip dan dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8.2 Kedudukan UUD 1945

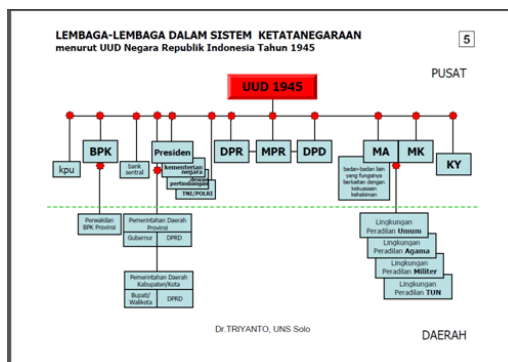
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertinggi Indonesia dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 mengatur dasar negara, struktur negara, kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara, termasuk Pancasila sebagai ideologi negara, dan menentukan kewenangan dan tugas-tugas lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan lain-lain. UUD 1945 juga menjamin hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Kedudukan UUD 1945 sebagai ketatanegaraan di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta didukung oleh suatu sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang lainnya. Oleh karena itu, segala kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk undang-undang yang dibuat oleh DPR, harus selaras dengan UUD 1945. Dalam prakteknya, UUD 1945 juga sering dijadikan acuan dalam berbagai kasus hukum dan kebijakan pemerintah. Pengambilan keputusan politik dan hukum harus selaras dengan isi dan semangat UUD 1945, sehingga UUD 1945 menjadi pedoman dan pegangan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8.3 Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi. Hal 58 | Pengantar Pendidikan Pancasila

ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memegang peran penting sebagai lembaga tertinggi dalam negara. MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan amandemen UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. DPR dan DPD bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengesal Kabinet.



Gambar 11. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan

(Sumber : <http://zulfantastic.blogspot.com/>)

Pancasila juga memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai landasan ideologi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat lima nilai-nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan dalam pembuatan kebijakan, perumusan undang-undang, dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengarahkan pembangunan nasional.

BAB IX PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

9.1 Pancasila Paradigma Pembangunan

Pancasila adalah paradigma pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip Pancasila yang mengajarkan tentang gotong royong, kerja sama, keadilan sosial, dan demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pembangunan nasional, Pancasila juga menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam pembangunan, di mana pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga memberikan pedoman dalam pembangunan sektor ekonomi, di mana Pancasila menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya pembangunan kebudayaan dan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai upaya memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

9.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK

Pancasila juga menjadi paradigma pembangunan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Pancasila memberikan arahan bagi pengembangan IPTEK yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang tinggi, serta mengedepankan kepentingan nasional. Sebagai paradigma pembangunan IPTEK, Pancasila menekankan pentingnya pengembangan IPTEK yang mampu memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga menekankan pentingnya memanfaatkan IPTEK dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menghindari dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya kemandirian dalam pengembangan IPTEK. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang IPTEK dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam menghasilkan produk IPTEK yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Pancasila juga memberikan arahan dalam pengembangan IPTEK untuk memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam pengembangan IPTEK, serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK menunjukkan bahwa pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, moral, kepentingan nasional, kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengembangan IPTEK dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memperkuat kedudukan Indonesia di tingkat internasional.

9.3 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)

9.3.1 Pengembangan Ideologi

Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma pengembangan ideologi karena memuat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan ideologi. Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun sebuah ideologi. Dalam konteks pembangunan ideologi, Pancasila juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menciptakan sebuah sistem politik dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Misalnya, nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembangunan ideologi yang mendorong distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, Pancasila juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam membangun ideologi yang menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep demokrasi yang menjadi salah satu pilar dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memiliki potensi besar sebagai paradigma pengembangan ideologi yang mengakomodasi nilai-nilai dasar yang diinginkan dalam sebuah sistem politik dan sosial yang baik dan adil.

9.3.2 Pengembangan Politik

Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma pengembangan politik karena memuat prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pancasila menekankan pada nilai-nilai seperti demokrasi, musyawarah, konsensus, dan keadilan sosial yang menjadi landasan dalam pembangunan sistem politik yang baik. Sebagai paradigma pengembangan politik, Pancasila dapat menjadi acuan

dalam mengembangkan sistem politik yang responsif, akuntabel, dan transparan. Prinsip demokrasi dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Sementara itu, prinsip musyawarah dan konsensus dapat menjadi landasan bagi terbentuknya keputusan politik yang inklusif dan partisipatif.

Selain itu, Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan sistem politik yang baik. Prinsip ini dapat menjadi acuan dalam membangun kebijakan publik yang adil dan merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat hak asasi manusia. Dalam konteks pembangunan politik, Pancasila juga dapat menjadi acuan dalam membangun sistem politik yang stabil, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma pengembangan politik yang inklusif, partisipatif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.

9.3.3 Pengembangan Sosial-Budaya

Pancasila juga dapat dijadikan sebagai paradigma pengembangan sosial budaya, karena terdapat nilai-nilai sosial dan budaya yang tertanam dalam Pancasila. Beberapa nilai tersebut antara lain, Gotong Royong: nilai ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Gotong royong mengajarkan manusia untuk saling membantu dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Kemudian Keadilan sosial: nilai ini menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial menekankan perlunya pembagian sumber daya yang merata, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Persatuan Indonesia: nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Persatuan Indonesia mengajarkan manusia untuk menghargai

perbedaan dan menjunjung tinggi keragaman budaya. Dengan memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam Pancasila, diharapkan dapat memperkuat kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya yang ada saat ini.

9.3.4 Pengembangan Ekonomi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga dijadikan sebagai pandangan dalam pengembangan sektor ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi berarti bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan demokrasi. Dalam pengembangan ekonomi, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara gotong royong untuk mencapai kemakmuran bersama.

Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pengembangan ekonomi. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas perlindungan sosial, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Dalam pandangan Pancasila, pengembangan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan persatuan Indonesia dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada keunggulan lokal dan menjaga kemandirian ekonomi nasional. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ekonomi, diharapkan dapat tercipta kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

9.3.5 Pengembangan Hankam

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memberikan paradigma dalam pengembangan sektor pertahanan dan keamanan atau hankam. Paradigma

ini tercermin dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa negara Indonesia harus memperlakukan semua manusia dengan adil tanpa diskriminasi dan dengan cara yang beradab. Dalam konteks hankam, hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dalam mengambil kebijakan pertahanan dan keamanan. Selain itu, Indonesia juga harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta internasional.

Pancasila juga mengajarkan tentang gotong royong atau kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam konteks hankam, hal ini dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kerja sama antarnegara dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti misalnya kerja sama militer dan intelijen. Dengan demikian, Pancasila memberikan paradigma yang komprehensif dalam pengembangan sektor hankam, yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mengedepankan kemanusiaan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara.

BAB X KEBANGKITAN NASIONAL DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Kebangkitan nasional merupakan gerakan sosial, politik, dan budaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada awal abad ke-20 dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Gerakan kebangkitan nasional ini menjadi awal dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang panjang dan berliku. Kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20 ketika para intelektual, pelajar, dan tokoh masyarakat mulai merasa prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih tertindas oleh kolonialisme Belanda. Mereka mulai mengorganisir diri dan membentuk berbagai kelompok perjuangan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional ini mengusung semangat nasionalisme, yang pada dasarnya adalah semangat cinta tanah air dan kebangsaan. Gerakan ini juga mengedepankan nilai-nilai seperti persatuan, kesatuan, dan gotong royong dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Di samping itu, kebangkitan nasional juga ditandai dengan lahirnya berbagai tokoh dan pemimpin bangsa yang visioner dan berani seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan banyak lagi. Mereka menjadi inspirasi dan panutan bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kebangkitan nasional juga ditandai dengan semakin aktifnya perjuangan rakyat melalui berbagai aksi protes dan demonstrasi. Salah satu contohnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersumpah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional yang dimulai pada awal abad ke-20 telah berhasil menciptakan momentum yang kuat dalam perjuangan

kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Mambo, G. C., Grace, D., & Michelle, B. (2021). Memahami Pelanggaran Hukum Dan Konsekuensinya Terkait Dengan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Siswa Smas Katolik Yos Sudarso. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 753–758.
- Andriani, A. (2016). Posisi Nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *CIVICUS*, 20(2).
- Anggraeni, N., Cantika, R., Pradita, R., Giyantari, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Menepis Kejahatan Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(III).
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Huda Chairul, M. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi*, 1(1), 78–99.
- Jumansyah, P. K., Palupi, A., Hadi, K., Syafei, A. W., Maksum, A., Zulkarnain, F. L., Sisngamangaraja, J., Masjid, K., Al Azhar, A., & Baru, K. (2022). Efektivitas Modul Nusantara dalam Memahami Empat. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 03, 2745–5939. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1023>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Manullang Belferik. (2013). Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Karakter*, III(1), 1–14.

- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 6(1), 1–23. www.fiskaldepkeu.go.id
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107. <http://e-journal.unipms.ac.id/index.php/citizenship>
- Nadifah Nur Fauziah, I., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(02), 93–103.
- Pianto Heru Arif. (2018). Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Rangka Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan. *MUKADIMAH*, 1(2), 179–187.
- Pulungan Muhammad Soleh. (2015). Membangun Demokrasi Pancasila Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Gerbang Etam*, 9(2), 15–32.
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Rajagukguk, K. J., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 773. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.927>
- Santoso, G., Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, & Ma'mun Murod. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Juperta)*, 02(01), 201–223.
- Saputra Andika, & Slamet Sabar. (2016). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive*, 5(2), 273–286.
- Shifana Savitri, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi. *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, V(2), 165–177. http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_inventa

- Siagian, S. B. U. (2020). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1).
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 168–176.
- Tedjo Pratiwi. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, Dan Keputusan Politik. *Mimbar Administrasi*, 15(29), 116–134.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Widodo Wahyu. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V(1), 679–691.
- Yasin, M., & Safitri, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Dalam Melaporkan SPT Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 1–22.
- Yunus, N. R. (2016). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>
- Zaidan, M. A., & Yuli, Y. (2015). Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 188–201. www.kompasiana.com/.../